44KUM 25/91

HASIL PENELITIAN

IPUSTARAAN "IN VERSITAS ANDA

ADD SWIST KHITSUS

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS AND ALAS
KONTRAK No.006 / PP_UA / SPP_10/1990

PROGRAM MANUNGGAL SAKATO POLA PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KOTA -MADYA PADANG

Oleh:

THAMRAN ANWAR.S.H



DEPARTEMEN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN

DUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS AND ALAS
JALAN PERDITIS KEMBRIDEKAAN 77 PADANG TILP, 2016

PADANG

1991

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka pembangun an manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya - adalah suatu pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia. Sekitar 80% penduduk Indonesia bermukim di Daerah Pedesaan yang tingkat hidupnya re latif masih rendah dan untuk meningkatkan tingkat hidup - tersebut perlu peningkatan kesempatan kerja serta peningkat an produksi dan produktifitas. Sejalah dengan itu perlu pu la ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya yang sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dalam hal menanggulangi keadaan-keadaan tersebut ser ta peningkatan taraf kehidupan masyarakat, maka pemerintah Orde Baru telah menetapkan kebijaksanaan pembangunan nasio nal yang ditujukan pemerintah kesegala aspek kehidupan dan penghidupan rakyat yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan yang langsung diarahkan kedaerah pedesaan yang dilaksanakan secara menye luruh dan terpadu.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang menyeluruh ini, dan dalam rangka membina kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara pembangunan nasional dan pembangunan - daerah serta pembangunan Desa dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan.

Dengan demikian kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan Desa merupakan perwujudan dari Garis-Garis Besar Haluan Ne gara dan program pembangunan lima tahun ketiga di pedesaan, demi terwujudnya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya serta kesatuan pertahanan dalam seluruh wilayah negara sebagai pencerminan kepentingan nasional - yang bulat dan menyeluruh dalam suatu wawasan nusantara da lam arti kata membangun manusia Indonesia seutuhnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis mengemukakan hasil penelitian tentang "Program Manunggal Sakato Suatu Pola Pembangunan Kelurahan Di Kotamadya Padang", ada baiknya terlebih dahulu deskrip - tif beberapa aspek yang ada kaitan dengan materi penelitian ini. Mengingat lokasi penelitian ini dilakukan pada 12 Kelurahan dalam 4 Wilayah Kecamatan yang dianggap cukup mewa - kili seluruh Wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang. Oleh karena kondisi wilayah yang berbeda satu sama lain, maka penulis mengelompokkan wilayah ini atas 3 kelompok, sesu ai dengan sampel yang ditarik, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Letak, dalam hal ini penulis baji atas 3 (tiga) ma - cam lokasi sesuai denjan situasi dan kondisi Kelurah an, yaitu lokasi Kelurahan yang terletak berdekatan/dalam pusat kota, lokasi kelurahan yang terletak pada daerah transisi dan lokasi kelurahan yang terle - tak pada pinggiran kota.

Berdasarkan data yang diperoleh lewat jawaban dari wawancara penulis dengan responden serta pengamatan penulis dari sampel, yang ditarik, maka dapat digambarkan lokasi kelurahan yang terletak bersekatan/dalam pusat kota ;

- Kelurahan Padang Pasir Selatan.
- Kelurahan Olo.
- Kelurahan Imam Bonjol.
- Kelurahan Parak Rumbio.

Kelurahan yang lokasinya terletak pada daerah transisi ;

- Kelurahan Rawang Barat.
- Kelurahan Pitameh.
- Kelurahan Parak Laweh.

Kelurahan yang lokasinya terletak pada daerah pinggiran;

- Kelurahan Kempung Jua.
- Kelurahan Timbulun.
- Kelurahan Kampung Pinang.
- Kelurahan Batung.

44

BAB. VI PENUTUP

Salah satu misi penting proyek Pembangunan Desa adalah melaksanakan Program-Program Pembangunan sedemikian rupa, se hingga kesenjangan sosial khususnya yang masih bercokol diwi layah-wilayah Pedesaan bisa dikurangi. Abapabila Pembangunan Pedesaan yang berientasi pada pengembangan wilayah ini berha sil, maka dua tujuan positif sekaligus tercapai, pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih hidup keku - rangan, dan kedua menyiutkan jurang perbedaan pandangan anta ra wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pembangunan itu bertujuan menghasilkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya dan melalui pembangunan diharapkan suatu perobahan yang meningkat, tanpa adanya kegiatan yang terenca na dan terarah serta tidak sesuai dengan tujuan yang diingin kan, maka tujuan pembangunan itu tidak dapat terwujut.

Demikian pula halnya dengan Pembangunan Desa/Kelurahan harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, atas tujuan tersebut - kegiatan Desa/Kelurahan perlu diharapkan dala m pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan. Kotamadya Padang yang mempunyai 193 Kelurahan yang tersebar pada 11 Kecamatan telah menetap arah dan tujuan Pembangunan Kelurahan ini dengan adanya keter paduan antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem manung gal sakato.

Sistem manunggal sakato adalah suatu strategi untuk me membulatkan tekad dan memadukan segala upaya sumber daya bagi p eningkatan tarif kehidupan masyarakata Kelurahan, karena - sasaran Pembangunan Kelurahan menyangkut banyak faktor yaitu kebijaksanaan dan Program-program Pemerintah, struktur ekonomi dan sosial, keadaan sumber daya dan iklim kehidupan sosial - politik pada tingkat Kelurahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- BAYU SURYANINFRAT DRS: Desa den Kelurehan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Penye lenggaraan Pemerintahan, Jakarta.
- 2. DAENS SUDIRO. : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa Angka,
 Bandung 1984.
- 3. KANSIL, C.ST, SH : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daewah
 Dilengkapi dengan Pemerintah Desadan Pembangunan Desa.
- 4. MOMON SOBTISNA SANDJA: Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan JA; SJACHRAN BASAH. Pemerintahan Desa .

 Alumni Bandung, 1983.
- 5. SURYADI, A. DRS. : Pēmbangunan Masyarakat Desa, Alumni Bandung, 1983.
 - : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ten tang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
 - : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ten teng Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.
 - : Ketetapan MPR No. II MPR 1983.
 - : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
 - : Instruksi Presiden Nomor 6/1984 tenteng Penyelenggerean Bantuan Pembang unan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan -Desa.
 - : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang, Nomor 188. 45.1.90/SK-SEX/1990.
 - : Pola Pembangunan Daerah Pedesaan Sumatera Barat. Makalah dalam seminar Ikatan Alumni Unand Padang, Desember 1988.

6. SYAFRIZAL.